

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara yang dikelola oleh pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah seharusnya didukung dengan pengawasan yang handal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Mabruri dan Winarna, 2010). Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Di Indonesia terdapat tingkatan-tingkatan badan pengawasan, yang tugasnya untuk mengawasi apakah dana yang ada terdistribusi dengan merata atau tidak (Sukriah, Akram, Inapty, 2009). Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten atau kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan badan pemeriksa eksternal yang independen.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum

yang pertama (SA Seksi 210 SPAP, 2011) menyebutkan bahwa, “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup”. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) yang menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Mabruri dan Winarna, 2010). Standar umum audit yang ke tiga menyebutkan bahwa, “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat dan seksama”, (SA Seksi 230 SPAP, 2011).

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian (Mabruri dan Winarna, 2010), (Singgih dan Bawono, 2010), dan (Alim, 2007), (Sukriah, Akram, Inapty, Biana Adha, 2009), (Batubara 2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada beberapa variable yang belum diuji atas pengaruhnya terhadap kualitas audit.

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, maka dalam tugas inspektorat sama dengan auditor internal. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi

yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberi sumbangan perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Oleh karena itu pemerintah daerah memegang peranan sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah Menurut Efendy (2010) dalam Nugroho (2012) .

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan,
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan, Mabruri dan Winarna (2010). Berdasarkan hasil penelitian oleh Batubara (2008) independensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarno (2010), yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kecakapan profesional dari seorang pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaannya. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa (Batubara, 2008).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarno (2010) variabel obyektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Pusdiklatwas BPKP (2008), auditor harus menjunjung tinggi ketidak-berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memroses data/ informasi audit. Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Prinsip auditor dituntut agar:

1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit.
2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan

3. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

Kompetensi dan Independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri di mana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjadi integritas dan obyektivitas mereka (Alim dkk, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010), variabel pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil audit yang dilakukan. Namun penelitian tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan pemerintahan pada kantor Inspektorat Kota/ Kabupaten atau Bawasda. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “PENGARUH INDEPENDENSI, KECAKAPAN PROFESIONAL, OBYEKTIVITAS, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT” (Studi Empiris di Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri ).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kecakapan profesional auditor terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh antara obyektivitas auditor terhadap kualitas audit?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pengalaman auditor terhadap kualitas audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara kecakapan profesional auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara obyektivitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, khususnya mengenai audit yang berkualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (independensi, kecakapan profesional, obyektivitas, kompetensi, pengalaman kerja).

##### **2. Sebagai Subyek Penelitian**

Hasil ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi Kantor Inspektorat dalam mengoptimalkan kinerjanya, pengambilan keputusan serta dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.

##### **3. Bagi Pembaca**

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, referensi serta bahan pertimbangan, dan acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan.

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisi tentang telaah penelitian dan landasan teori yang meliputi definisi auditing, definisi variable (Independensi, Kecakapan Profesional, obyektivitas, Kompetensi, Pengalaman Kerja dan Kualitas Audit). Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka toritis.

3. BAB III : Metode Penelitian.

Pada bab berikut berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable, metode analisis data, uji hipotesis.

4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan.

Bab hasil dan pembahasan berisi analisis data dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum Inspektorat, deskripsi responden, hasil analisis data dan pembahasannya.



## 5. BAB V : Penutup.

Pada bab penutup berisi tentang penutup yang berisi tentang simpulan, saran-saran atau masukan yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang terkait.